

Implementasi Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum dan Ekonomi Yang Berwawasan Kemaritiman Pada Masa Pandemi Covid-19

Tugino¹⁾, Harini²⁾
Fakultas Kemaritiman UNISVET
E-mail: tuginoutomo8@gmail.com

Diterima: Desember 2021, Di publikasikan: Januari 2022

ABSTRAK

Kristalisasi nilai – nilai Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam menghadapi wabah covid-19 perlu membutuhkan kebersamaan dan rasa persatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah dalam mensikapi dan menghadapi covid- 19 maka gotong – royong menjadi relevansi terbangun dan telah digelorkan oleh para pendiri negara. termasuk Indonesia adalah poros maritime dunia yang menjadi basis maritime sehingga mudah sekali kedatangan covid-19 yang saat ini bisa dirasakan ditengah masyarakat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hokum pada masa pandemic covid-19 berpijak pada nilai nilai moralitas sesuai dengan sila pertama mengajarkan nilai keimanan dan ke iklasan dalam menghadapi wabah covid-19, membangun dan pemulihan ekonomi menjadi prioritas saat ini ,Berdasarkan sila ke dua Pancasila bahwa pembangunan manusia juga diharapkan juga menjadikan budaya tolong – menolong dalam penangan covid-19 hal yang wajib dipertahankan yang tertuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa sehingga empati kemanusiaan diharuskan melahirkan persatuan gotong royong untuk menyelesaikan masalah ,kebersamaan ini yang akan mempeercepat penanganan pandemic Covid-19, saling membantu berbagi dan berkontribusi tanpa melihat Ras,suku, agama, adalah berkat nilai – nilai Pancasila sila ke tiga pencasila Persatuan Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi Pancasila pembangunan hokum dan Ekonomi di massa pandemi

PENDAHULUAN

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum dan Ekonomi berwawasan Kemaritiman dalam Mensikapi wabah covid-19 termasuk varian baru omicron. Presiden Jokowi sebut Pancasila jadi jurus jitu tangani pandemi (Harfyyan,2022) dan Pancasila itu masih kuat sekali kegotong royongan kita yang tidak dimiliki oleh negara lain, karena dalam kegotong royongan semua terlibat, semua bergerak dimulai pemerintah pusat, sampai daerah, TNI, POLRI, Organisasi-Organisasi rakyat perangkat sampai bawah (Setkab go.id) Melihat perkembangan di Indonesia yang berkelanjutan dengan penyebaran wabah virus corona (COVID-19) bahkan sampai tingkat Dunia yang mana belum dipastikan kapan akan unjung berakhirnya yang sampai meluluh lantakkan dari sendi – sendi kehidupan ekonomi, sosial budaya politik dan hancur krisis kesehatan maupun psikologis dengan kondisi ini pemerintah Indonesia dalam memberikan kebijakan aturan yang dinamakan pembatasan sosial (Sosial Distancing), dan dalam menghadapi wabah pandemi ini tantangan yang dihadapi tidak mudah karena berdampak pada sektor ekonomi, politik sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Oleh sebab itu Pancasila sebagai dasar idiologi negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang menjadikan kekuatan bangsa Indonesia sebagai bangsa antara lain rasa persatuan gotong royong meningkatkan solidaritas yang dibutuhkan dalam menghadapi wabah pandemi covid-19 yang sampai saat ini wabahnya mendunia, oleh karena itu massa pandemic covid-19 ini adalah momentum untuk menekankan bagaimana pentingnya nilai-nilai Pancasila teruji terhadap satu kesatuan bangsa dan nilai-nilai tersebut adalah merupakan idiologi dasar dari Pancasila dan Pancasila akan teruji kesaktiannya disaat kita bersatu padu dalam kebersamaan tidak gentar akan menghadapi wabah Pandemi covid-19 ini dan dibutuhkan solidaritas yang kuat di mulai dari tingkat pusat sampai tingkat lapisan bawah sehingga Pancasila sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan dan sekaligus kerangka untuk mencapai tujuan agar segera berakhir dengan wabah pandemi ini.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode empiris atau non doktrinal, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dalam hal ini penulis telah melakukan pengkajian melalui bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum berwawasan kemaritiman pada masa pandemic Covid-19.

Romana Dwi Febriati (2019) menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita – citakan untuk memerangi wabah pandemic Covid-19 dan varian baru omicron tentunya perlu ada nilai – nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban diantaranya;

Segala pembangunan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip keTuhanan Yang Maha Esa , sehingga menghormati ketertiban hidup beragama, dan rasa keagamaan.

Mampu menghormati nilai – nilai hak azasi manusia baik sosial politik maupun ekonomi sosial budaya dalam rangka hubungan antara bangsa dalam mengatasi problematika wabah covid-19 dan varian baru.

Persatuan nasional yang harus bisa mengedepankan pluralism sehingga bisa sama – sama menghadapi pandemi covid -19 varian omicron.

Hukum di Indonesia harus menghormati dan menjalankan (sebagai alat audit demokrasi.)

Menjadi kerangka keadilan sosial dalam hubungan antara bangsa berupa prinsip keadilan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pandemi ini

Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo (2020) dalam Konferensi Pers Gugus Tugas. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak bepergian, dan menghindari kerumunan. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. “Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi COVID-19,” mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharukan dan profesionalitas yang menakjubkan.

Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah, membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr. Hermawan Saputra menilai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) itu akan tetap menjadi pilihan untuk menekan laju penularan COVID-19 (PPKM), beberapa level yang sudah diterapkan termasuk isolasi lokal, larangan bepergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah berarti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Menurut Agus, pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh

yang pada hakikatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional. dalam kondisi pandemi corona saat ini, tentunya nilai-nilai Pancasila memberikan lebih kesadaran spiritual bagi kita, menumbuhkan nilai empati, tenggang rasa dan cinta bagi sesama, menjadi perekat bagi persatuan bangsa Indonesia, menjadi penyejuk dalam kita bernegara dan bermasyarakat, dan memberikan keadilan sosial serta kesejahteraan dalam berkehidupan bernegara.

Hermawan(2021) mengatakan vaksin bukan solusi jangka pendek bagi penanganan wabah. Di tengah munculnya ancaman gelombang kedua pandemi, pemerintah diminta untuk lebih agresif mengambil kebijakan. Seharusnya juga kontrol itu adanya di hulunya bukan di hilirnya. Hulunya itu masyarakat, jadi jangan sampai the new normal itu dipahami sebagai kembali kepada normal yang seperti semula sebagaimana belum ada Covid-19. Tempo Semarang empat kasus Omicron pertama terdeteksi di Kota Semarang pada Jumat, 21 Januari 2022.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam mengatakan, kasus Omicron itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Tengah. Dari 25 sampel yang dites whole genome sequencing empat di antaranya positif Omicron.

Menurut dia, keempatnya merupakan satu keluarga dan salah satunya baru pulang berlayar dari Malaysia pada 23 Desember 2021. Dia sempat menjalani karantina di Wisma Atlet Jakarta.

Pada 30 Desember 2021 dia menjalani tes polymerase chain reactions dan hasilnya keluar negatif. Orang tersebut kemudian pulang ke Semarang. Namun, pada 1 Januari 2022 merasakan tak enak badan.

Dia kemudian melakukan tes PCR mandiri di klinik swasta dan hasilnya keluar pada 3 Januari 2022 positif Covid-19. Istri dan kakaknya juga kemudian tes mandiri dan hasilnya sama, positif. Setelah di-tracing anaknya juga tertular.

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya maka nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini dimana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak pada baik sektor kesehatan maupun pada sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan, sehingga nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan untuk menjawab tantangan yang menjadi hakekat manusia, dan hakekat manusia Pancasila adalah manusia yang menjadi humanis dan yang menjadikan kodrat manusia yang memiliki ciri – ciri antara lain;

Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial yang mestinya harus terjaga dalam masa pandemi ini.

Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bertaqwa dan berdoa dalam mensikapi wabah pandemi /COVID-19 segera berlalu.

Susunan kodrat manusia yang terdiri atas jiwa dan raga yang harus terlindungi dalam masa pandemi ini.

Berdasarkan ketiga ciri tersebut diatas pembangunan pada masa pandemic ini diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi sosial dan aspek kesatuan pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara berkualitas kehidupan dalam

menghadapi pandemic yang belum kunjung reda. Gustav Radbruch, dalam Sudikno Mitro Kusumo (1986) menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada unsur yang harus diperhatikan sebagai berikut ;

1. Memenuhi rasa keadilan; Artinya dalam menegakkan hukum aparat penegak hukum harus bertindak adil jadi dalam rangka menyelesaikan masalah masalah termasuk pandemic covid-19 varian baru omicron dalam penanganannya harus bersikap adil.
2. Memenuhi rasa kemanfaatan; Dalam menjalankan tugas nya harus mempertimbangkan agar proses penegakkan hukum memiliki manfaat bagi masyarakat apalagi dalam menyelesaikan masalah dan penanganannya pandemic diselesaikan secara objektif.
3. Kepastian hukum; artinya pada hakekatnya adalah perlindungan hukum terhadap Tindakan yang sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya dalam penanganan wabah pandemic covid-19 dan varian baru omicron.

Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan hukum maka soliditas dan pembangunan hukum berpijak pada nilai moral daripada Pancasila secara khusus sistim ekonomi harus mendasar pada moralitas sesuai dengan sila I (pertama) Pancasila yang mengajarkan nilai keimanan kepada taqdir Tuhan bahwa manusia hanya merencana seperti membangun ekonomi akan berhasil tetapi hasil akhir berada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa ,seperti wabah COVID-19 adalah bagian dari ujian dalam kehidupan yang harus semakin menjadikan kita tambah kekuatan di luar dugaan mereka, sehingga religiusitas harus menyadarkan kita semakin kuat dimasa pandemi ini.

Sistim ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistik akan menghasilkan sistim ekonomi yang berperikemanusiaan yaitu sistim ekonomi yang menghadapi hakekat manusia baik selaku makhluk individu sosial sekaligus makhluk pribadi makhluk Tuhan, oleh karena itu sistim ekonomi yang harus dikembangkan menjadi sistim dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan pada saat pandemi COVID-19 ini kesejahteraan rakyat secara keseluruhan harus mendasarkan pada Pancasila yaitu berazaskan pada nilai kerakyatan dan kekeluargaan .

Secara umum sistim ekonomi di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai – nilai moral kemanusiaan pada masa pandemi Covid-19 pembangunan ekonomi harus harus mampu menyadarkan diri dari bentuk – bentuk moralitas persaingan bebas dan bahkan menambah penderitaan kesengsaraan pada masyarakat. sehingga perlunya Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi haruslah mengacu pada esensi pada sila ke empat [kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan] artinya bahwa kebijakan pemimpin dan elit pemerintah dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar – benar berorientasi pada kepentingan dan keberpihkan kepada rakyat dalam menangani paandemi covid-19 ini .

Dan dampaknya pada keberlangsungan tidak ada yang boleh mengambil keuntungan atau hasrat untuk penyalahgunaan kekuasaan serta otoritas ditanggung kesulitan rakyat dengan demikian ekonomi kerakyatan politik atau kebijakan ekonomi harus untuk sebesar – besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat yang harus mampu mewujudkan perekonomian Nasional yang lebih berkeadilan

bagi seluruh warga masyarakat, sehingga pada ekonomi kerakyatan ini lebih memberikan kesempatan ,dan dukungan untuk pengembangan ekonomi rakyat mencakup koperasi, UMKM usaha kecil dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu perekonomian di Indonesia mengacu ekonomi berkelanjutan akan mampu mengembangkan program – program kongkrit pemerintah daerah di era pandemic covid-19 ini yang lebih mandiri dan akan mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah, dengan demikian ekonomi kerakyatan akan memberdayakan rakyat dalam masa pandemic sehingga lebih adil , demokratis, transparan dan partisipatif dari pemerintah Indonesia keadilan dalam mengawal dan membangun ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peraturan atau kebijakan yang di berikan

Karakteristik sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab) disaat ini pandemi covid-19 empati dan tanggungjawab kemanusiaan benar – benar di uji membentuk kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah covid-19 tidak menyebar , disiplin protocol kesehatan menjadi tanggungjawab kolektif kolegal oleh karena itulah Pancasila pada hakekatnya bersifat pluralistik karena Pancasila bertolak dari hakekat dan kedudukan kodrat manusia,oleh karena itu pembangunan sosial budaya harus mampu membangun meningkatkan harkat martabat dan kedudukan manusia yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab dalam menyikapi musibah pandemic covid-19 ini dan sebagai manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaan dalam mensikapi kenyataan dalam wabah pandemi ini

Berdasarkan sila ke dua Pancasila pembangunan sosial budaya di kembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial budaya yang beragam di seluruh Indonesia menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa sehingga empati kemanusiaan haruslah melahirkan persatuan gotong royong untuk menyelesaikan masalah , kebersamaan ini yang akan mempercepat penanganan pandemic covid-19 , saling membantu berbagi dan berkolaborasi tanpa melihat Ras, suku, agama, adalah adalah tidak luput dari peran sila tiga Pancasila.

Dengan demikian pembangunan sosial budaya hukum pada masa pandemi covid-19 tidak menciptakan kesenjangan , kecemburuan , diskriminasi dan tertib dalam keadilan sosial ,paradigma baru dalam pandemi ini pembangun berkelanjutan yang dalam perencanaannya perlu di selenggarakan dengan menghormati hak sosial budaya yang terlibat untuk mengatur kehidupan berbangsa secara asasi individu secara berimbang , dalam sila kedua],paradigma ini dan cenderung dapat mengatasi sistim persaudaraan yang cenderung sosiopluralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia.

Dengan demikian pada era pandemi covid-19 tidak akan menyerah pada ke individu daerah tetapi justru akan memadukan pembangunan daerah ,dengan pembangunan nasional sila keempatsehingga akan mengatur keseimbangan dan pemerataan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang sanggup menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI sila ketiga dalam mengurangi memutus mata rantai masa pandemi sekarang ini.bila dicermati nilai –

nilai Pancasila sebagai Puncak dan kerangka acuan bersama diantaranya sila [I] pertama perwujudanya tidak satupun pada masa pandemi dalam suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat yang tidak mengenal kepercayaan tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara.

PENUTUP

Nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dalam menghadapi wabah Covid-19 perlu membutuhkan kebersamaan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah dalam menghadapi upaya penanganan Covid-19, oleh karena itu masih relevansinya dengan konteks berkaitan pandemi ini yang mulai gotong-royong yang telah dibangun dan yang telah digelorakan para pendiri negara yang saat ini sangat dirasakan pada tengah-tengah masyarakat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 berbijak pada nilai-nilai moral daripada Pancasila secara khusus sistim ekonomi harus mendasarkan pada moralitas sesuai dengan sila pertama mengajarkan nilai keimanan dan keikhlasan dalam menghadapi wabah Covid-19 tetap membangun dan memulihkan ekonomipada saat pandemi untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan kekeluargaan.

Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya pada masa Pandemi Covid-19 esensi Pancasila pada sila 2 (dua) kemanusiaan yang adil dan beradab di saat ini Pandemi Covid-19 empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar – benar diuji membentuk satu kesatuan bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabahtidakmenyebarlagi, disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif kolegal.

Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum manusia dalam masa pandemi ,sila keempat menjadikan kebijakan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar – benar berorientasi pada keputusan bersama rakyat dalam menangani pandemi Covid-19 yang dampaknya pada keberlangsungan kehidupan aman dan sehat. dan paling tidak kita harus mengupayakan 3 hal, pertama masyarakat harus membangun inisiatif perlindungan menyatu secara mandiri dengan semangat gotong royong yang istilah Ganjar Pranowo (2020) Jogo Tonggo. Kedua dalam menangani Covid-19 masyarakat harus berusaha dan memberi apresiasi baik yang dilakukan oleh siapapun termasuk pemerintah yang memberikan kebijakan yang baik. Ketiga, rakyat dan masyarakat harus mengkosulidasikan diri dengan kokoh supaya kepentingan public dapat lebih tercermin dalam rangka memutus mata rantai pandemi. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan dalam masa pandemi Covid-19. Pertahanan semesta harus terbangun dan terbina sehingga seluruh komponen nasional untuk dilibatkan baik pemerintah melalui gugus Covid, TNI, POLRI dan seluruh stakeholder yang ada untuk menanggulangi wabah tersebut yang sudah menjadi program pemerintah yaitu 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) sembari menunggu Vaksin sampai ke Masyarakat.

Simpulan dipaparkan sebanyak 5% dari panjang artikel, ditulis dengan spasi 1, dengan font Times New Roman ukuran 12 pt. Istilah asing ditulis dengan huruf miring. Simpulan merupakan pernyataan singkat tentang hasil dan temuan yang didapatkan. Saran-saran mengacu pada hasil dan pembahasan (tidak harus ada) atau identik dengan penelitian lanjut pada masa yang akan datang. Ditulis dalam bentuk paragraf tanpa penomoran. Jika bermaksud memberikan penomoran dapat diformat samacam ini, (1) ini adalah penomoran pertama, (2) ini adalah penomoran kedua, dan (3) ini adalah penomoran ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wijaya, 2001, Filsafat Pancasila Sebagai Paradigma Bidang Hankam, Ditjen Dikti Bandung, kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Letnan Jenderal (Purn.)
- Agus Widjojo dalam Konferensi Pers Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Senin, 1 Juni 2020.
- Astrid Susanto Sunarto, 2000, Masyarakat Indonesia Memasuki Abad Ke Dua Puluh Satu, Dirjen Dikti, Jakarta.
- Bonna, Charezub, 2020, Hofwarelecture And Reaceach Universitas Indonesia, Jakarta.
- BPKD. Banjarkab.go.id/idek.php. 2017, Diakses tanggal 19 Februari 2021.
- Elly M. Setiadi, 2005, Panduan Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ganjar Pranowo, 2020, SUARA MERDEKA.com, diakses tanggal 24 Februari 2021.
- Heri Hardiawanto dkk, 2019, Spriritualisme Pancasila, Prenadamedia, Jakarta.
<https://bit.ly/3g80pkA> Indo
- Paristiyanti Nurwandani, 2016 Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Dirjen Pendidikan tinggi, Jakarta.
- Prof Dr Mella Ismelina FR, SH, MHum Kaprodi PS Magister Kenotariatan dan Kaprodi PSDH,
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/06/111241265/merenungkan-nilai-nilai-pancasila-dalam-pandemi-corona?page=all>.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/13/kondisi-per-daerah-masih-beda-pakar-kesehatan-masyarakat-nilai-ppkm-masih-jadi-pilihan-tekan-covid>.
- <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/13/kondisi-per-daerah-masih-beda-pakar-kesehatan-masyarakat-nilai-ppkm-masih-jadi-pilihan-tekan-covid>. Penulis: Galuh Widya Wardanie